

**PELAKSANAAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN
DI RUMAH UMAH TAHANAN KLAS II B MAGETAN**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata I pada Jurusan
Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

SEPTIKA RINDU JUANITA

C100130130

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN DI RUMAH
TAHANAN KLAS II B MAGETAN
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

SEPTIKA RINDU JUANITA

C.100130130

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa', with a large circular flourish on the left side.

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
NIK. 536 / NDIN. 0625045901

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN DI RUMAH
TAHANAN KLAS II B MAGETAN**

Yang ditulis oleh:

SEPTIKA RINDU JUANITA

C.100130130

Telah Diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal 24 Maret 2017

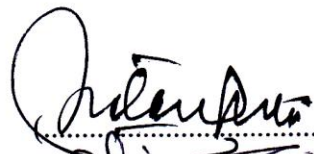
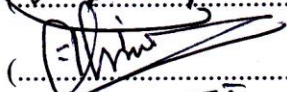

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum

Anggota : Muchamad Iksan, S.H., M.H

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum
NIK. 536 / NDIN. 0625045901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Maret 2017

Penulis



SEPTIKA RINDU JUANITA

C100130130

PELAKSANAAN REMISI TERHADAP WARGA BINAAN DI RUMAH TAHANAN KLAS II B MAGETAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan remisi dan kendala serta solusi dalam pelaksanaan remisi terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana kecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Penelitian ini menguraikan sistem pembinaan narapidana selama menjalani hukuman. Pembinaan ini merupakan kegiatan yang bersifat berlanjut dan intensif agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan kata lain narapidana harus diakui hak-hak asasinya sebagai manusi dan memperoleh keadilan. Apabila narapidana atau warga binaan berkelakuan baik maka hal ini dapat dipertimbangkan dalam pemberian remisi. Namun dalam pemberian remisi ini tentunya tidak terlepas dengan berbagai kendala sehingga penelitian ini juga menguraikan tentang apa saja yang menjadi kendala dalam pemberian remisi dan bagaimana solusi dalam penyelesaiannya.

Kata kunci : *Remisi, Narapidana, Pembinaan*

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of remission and constraints and solutions in the implementation of remission to inmates at the Detention Class II B Magetan. Remission is a reduction in criminal past were given to prisoners and criminal children who have behaved well during a sentence except those sentenced to death or life imprisonment. This study outlines the guidance system for inmates serving sentences. Coaching is an activity that is continued and intensified in order to convict realizing his mistake, to improve themselves and not committing a crime again. In other words, prisoners should be recognized as a basic human rights for human and obtaining justice. If the inmate or inmates behave well then it can be considered in granting remission. But in granting remission is certainly not without difficulties, resulting in this study also outlines about what are the obstacles in remissions and how solutions at their disposal.

Keyword :Remission, Convict, Development

1. PENDAHULUAN

Dalam buku-buku hukum pidana dapat dilihat bahwa hukum pidana itu dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Berhubungan dengan makin populernya pembagian hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan

hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP) di Indonesia, banyak penulis yang berpendapat berbeda mengenai keduanya. Perundang-undangan pidana umum ialah KUHP beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Undang-Undang No 73 Tahun 1958 dan lain-lain. Sementara itu, perundang-undangan hukum pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis Pidana tercantum dalam Pasal 10:²

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok:

- 1. Pidana Mati*
- 2. Pidana Penjara*
- 3. Pidana Kurungan*
- 4. Pidana Denda*

Tujuan pidana dalam bahasa Inggris antara lain adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution* serta *Deterrence*. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. *Restraint* berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan lebih aman. *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sementara *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.³

Dalam pelaksanaan tujuan pidana tersebut di atas, terdapat beberapa subsistem peradilan pidana yang dapat digunakan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan lagi bagi pelaku tindak pidana. Salah satu subsistem peradilan pidana yaitu subsistem permasyarakatan dimana subsistem ini merupakan wadah penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh

¹ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 10-13

² Moeljatno, 2003, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta; Bumi Aksara, hal. 5

³ Andi Hamzah, *Op., Cit*, hal. 28

pengadilan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan yang menjelaskan bahwa tujuan pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴

Sistem permasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal.⁵ Masuknya terpidana ke dalam lembaga permasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru dalam masyarakat.⁶ Pembinaan ini dilakukan secara kontinyu dan intensif agar narapidana menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri.⁷ Namun seiring berjalannya waktu, fungsi dari lembaga permasyarakatan untuk membina terpidana ini menjadi overload sehingga tugas dan fungsi ini dapat dilakukan di Rumah Tahanan. Selama menjalani pembinaan, tidak lupa dengan hak-hak yang diberikan kepada narapidana.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, maka penulis memiliki permasalahan dalam penelitian ini *Pertama*, bagaimana profil atau sejarah singkat mengenai Rumah Tahanan Klas II B Magetan. *Kedua*, bagaimana pelaksanaan remisi terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan. *Ketiga*, apa saja kendala dalam pelaksanaan remisi terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan. *Keempat*, apa solusi atas kendala dalam pelaksanaan remisi terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui profil atau sejarah singkat mengenai Rumah Tahanan Klas II B Magetan. *Kedua*, untuk

⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 319-320

⁵ Harsono, 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal. 17

⁶ Kadri Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 125

⁷ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Aksara, hal. 27

mengetahui pelaksanaan remisi terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan. *Ketiga*, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan remisi terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan. *Keempat*, untuk mengetahui solusi atas kendala dalam pelaksanaan remisi terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan. Sementara ini, manfaat dari penelitian ini antara lain *Pertama*, manfaat teoritis dimana penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam pemberian remisi terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan. *Kedua*, manfaat praktis (a) bagi peneliti sebagai pengalaman penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan remisi dan (b) bagi pembaca penelitian ini memberikan informasi maupun sebagai referensi mengenai pemberian remisi terhadap warga binaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan Empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan remisi kepada warga binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian Kualitatif yang dimana penulis melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka. Jenis data yang digunakan penulis yaitu jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan logika deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hasil perbandingan antara norma dan kenyataan yang ada pada lokasi penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Singkat Rumah Tahanan Klas II B Magetan

Kantor Wilayah Jawa Timur Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki satuan kerja di Kabupaten Magetan yaitu Rumah Tahanan Klas II B Magetan yang beralamat di Jl. Merapi No. 168 Magetan. Rumah Tahanan ini dibangun pada tahun 1952 dengan luas tanah 4680 m² dan luas bangunan 1549 m²,

berisi kamar hunian tahanan dan narapidana dengan luas 487 m². Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PR.08.03 tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan menyatakan pengertian Rumah Tahanan yaitu:⁸

“Rumah Tahanan Negara adalah Unit Pelaksana Teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”

Tujuan dan fungsi dari Rumah Tahanan ini dapat menjadi sarana untuk memelihara integrasi dalam masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial, sehingga sistem pengawasan masyarakat dapat terkontrol. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan yang harus diperhatikan demi terciptanya masyarakat yang bertanggung jawab dan mandiri dan berguna serta berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan cita-cita bangsa. Dalam kegiatan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan harus didasarkan dalam beberapa hal sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, antara lain Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan bimbingan, penghormatan harkat dan martabat, dan seterusnya.⁹

Pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan antara lain yaitu pembinaan agama, kepribadian dan kegiatan mandiri dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan yang sudah dijalani menimbulkan efek positif bagi para narapidana atau warga binaan di rutan tersebut, para narapidana ini mengikuti pembinaan dengan baik dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Para narapidana berharap semoga pembinaan yang dilakukan di Rutan dapat menjadi lebih baik dan ketika narapidana keluar dari rutan menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat bermanfaat dalam masyarakat.

3.2 Pelaksanaan Remisi terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan

Sistem perasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan ini merupakan suatu pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.¹⁰ Remisi atau

⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PR.08.03 tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan.

⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hal. 127

¹⁰ Al Amruzi, M. Fahmi, *“Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana”*, Jurnal Darussalam, Vol. 15., Nomor 2 Tahun 2014, hal. 25-34

pengurangan masa pidana yang diterapkan oleh Rumah Tahanan Klas II B Magetan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Pasal 34 PP No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Permasyarakatan, persyaratan pemberian remisi juga tertuang dalam Pasal 34A ayat (1) PP No. 99 tahun 2012:¹¹

“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: (a) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; (b) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; (c) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: (1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau (2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme”

Dalam proses pengajuan remisi harus memenuhi beberapa prosedur, antara lain yang tertuang pada Pasal 12 dan Pasal 13 Permenkumham di atas:¹²

Pasal 12 “(1)Tim pengamat permasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Naapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3; (2)Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usulan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah”

Pasal 13 “(1)Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian remisi berdasarkan rekomendasi tim pengamat permasyarakatan Kantor Wilayah;(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal”

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Permasyarakatan.

¹²*Ibid.*,

Dalam pemenuhan hak-hak Narapidana ini, selain Remisi yang didapatkan oleh Narapidana ada hak-hak lain yang timbul, yaitu; a) Cuti bersyarat; b) Cuti menjelang bebas; dan c) Pembebasan Bersyarat. Namun berdasarkan wawancara dengan Bp. Wahyu Tetuko Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, selain hak-hak diatas Narapidana di Rutan Klas II B Magetan mendapatkan hak:¹³

“Hasil karya yang dibuat oleh Narapidana dipamerkan dalam etalase dalam rangka perayaan hari jadi Kabupaten Magetan setiap tahunnya”

Pada dasarnya narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi permasyarakatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 11 Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Suti Menghubungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang dapat diberikan kepada narapidana di rumah tahanan Magetan ini dapat berupa karya ilmiah yang dibuat oleh narapidana dipamerkan dalam etalase dalam rangka perayaan hari jadi Kab. Magetan.

Menurut Rumah Tahanan Klas II B Magetan, pemberian remisi terhadap narapidana dilaksanakan melalui tahapan prosedur administrasi, yaitu pihak Rumah Tahanan mengajukan usulan remisi kepada pihak yang berwenang, Kanwil Departemen Hukum dan HAM setempat. Setelah melalui birokrasi di instansi tersebut, lalu usulan remisi disetujui. Lambannya birokrasi yang dilalui tersebut kadang-kadang bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian remisi.

Berikut tabel pemberian remisi pada Rumah Tahanan Klas II B Magetan pada tahun 2012-2016.¹⁴

Tahun	Remisi Umum I	Remisi Umum II	Remisi Khusus I	Remisi Khusus II
--------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

¹³ Tetuko Wahyu, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 4 November 2016, pukul 10:00 WIB

¹⁴ Handoko, Pegawai Rutan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 4 November 2016, pukul 11:00 WIB

2012	29 orang	3 orang	25 orang	1 orang
2013	33 orang	1 orang	34 orang	-
2014	31 orang	5 orang	36 orang	7 orang
2015	32 orang	3 orang	29 orang	-
2016	49 orang	1 orang	35 orang	-

Untuk mengukur efektivitas dari pemberian remisi ini harus diperhatikan pula tujuan dari pemidanaan yang memiliki arti mendidik dan membuat efek jera bagi narapidana sehingga para pelaku tidak melakukan tindak pidana lagi. Menurut Rumah Tahanan Klas II B Magetan penerapan pembinaan dan remisi ini diharapkan para narapidana bisa berbuat baik, bermasyarakat dan mampu menciptakan gagasan, ide untuk program-program kegiatan positif dalam masyarakat. Pemberian remisi terhadap narapidana harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan bukan justru kebalikannya. Oleh karenanya pemberian remisi tersebut harus sesuai dengan peraturan dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta dibawah pengawasan dan penilaian yang objektif.

3.3 Kendala dalam Pelaksanaan Remisi terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan

Dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Pemberian remisi yang diberikan sebagai hak narapidana ini sudah dilakukan dengan baik dan semaksimal mungkin. Namun pada kenyataannya, berbagai kendala bisa menghambat adanya pelaksanaan remisi maupun dalam proses pengajuan remisi.

Kontroversi dengan adanya pelaksanaan remisi saat ini yang terjadi antara lain dengan munculnya Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Adanya persyaratan khusus untuk mendapatkan remisi bagi pelaku tindak pidana khusus antara lain korupsi, narkoba yaitu dengan menjadi *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.¹⁵ Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. Pihak yang kontra terhadap munculnya PP ini adalah Menteri Hukum dan HAM, menurutnya seburuk-buruknya narapidana kasus korupsi, mereka tetap harus diberikan haknya untuk mendapat keringanan hukuman, seperti narapidana yang lainnya. PP ini dinilai justru menimbulkan diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, Justice Collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu pada dirinya.

Sementara itu, kendala yang ada dalam pelaksanaan remisi pada Rumah Tahanan Klas II B Magetan antara lain pada persyaratan pengajuan remisi yaitu dalam administrasi dan berkas-berkas narapidana, pemenuhan berkas inilah yang menjadi penghambat pengajuan remisi kepada Kantor Wilayah Jawa Timur, karena data-data narapidana harus lengkap dan valid, kendala yang lainnya adalah pada sisi substantifnya, yaitu dalam hal berperilakunya narapidana di Rumah Tahanan, selama narapidana dapat dengan mudah mengikuti pembinaan dan bisa berkelakuan baik, maka pengajuan usulan remisi juga lebih mudah didapatkan. Selain itu minimnya keahlian komputer para pegawai khususnya untuk pelayanan atau pengajuan remisi yang sekarang bisa dilakukan secara *online* membuat pegawai rumah tahanan sedikit kesulitan untuk melakukan tugasnya.

¹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator

3.4 Solusi dalam kendala Pelaksanaan Remisi terhadap Warga Binaan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan

Sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan jaminan persamaan di depan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya. Dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) disebutkan:¹⁶

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Rakyat memiliki hak untuk sejahtera, hak untuk bersekolah di sekolah atau perguruan tinggi yang baik, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan martabat sesuai kemampuannya dan lain-lain. Pemerintah wajib melakukan upaya untuk pemenuhan hak-hak tersebut melalui pembangunan yang terencana dan berkeadilan. Termasuk hak-hak para narapidana yang melakukan tindak pidana juga memiliki peluang yang sama dalam menikmati haknya sebagai manusia. Namun narapidana ini harus mengikuti berbagai pembinaan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi.

Dalam proses untuk memperoleh hak-haknya itu narapidana harus mampu berkelakuan baik dan mengasah diri untuk dapat berkarya yang bermanfaat bagi masyarakat. Berbagai kendala dalam pemenuhan hak tersebut diatas sudah banyak terjadi dan memerlukan solusi yang dapat dijadikan alternatif untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan hak narapidana khususnya remisi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun sistem peradilan pidana yang membatasi masuknya perkara ke dalam sistem itu sendiri antara lain membatasi jenis dan jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung dan Pengadilan tinggi merupakan salah satu solusi dari masalah ini. Perkara pidana ringan diselesaikan melalui *“out of court settlement”* yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila yang dikenal sebagai *“restorative justice”*.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Selain itu perlu dilakukan pula peningkatan pengawasan horizontal dan vertikal serta pengawasan internal yang dilakukan oleh Ditjen

¹⁶ UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Permasyarakatan yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham, demikian pula dalam lingkup rumah tahanan sendiri ada juga pengawasan melekat untuk memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara berjenjang. Terdapat beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dipakai dengan pembentukan Balai Pertimbangan Permasyarakatan dan Tim Pengamat Permasyarakatan seperti yang dilakukan Rumah Tahanan Klas II B Magetan yang juga menggunakan pengawasan dengan adanya Tim Pengamat Permasyarakatan yang dilakukan langsung oleh Kepala Subseksi Pelayanan Narapidana.

Sementara itu, pengawasan eksternal yang dilakukan dilakukan oleh pihak yang memiliki garis koordinasi secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sebagai induk dari organisasi permasyarakatan terhadap integritas dan profesionalitas petugas Rumah Tahanan.¹⁷ Melihat bentuk dan konsep mekanisme kontrol yang ada dalam sistem hukum dan politik, paling tidak ada 2 (dua) bentuk pengawasan eksternal yang bisa ditempuh, yaitu pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan oleh hakim pengawas dan pengamat (Hakim Wasmat). Dalam menjalankan pengawasan, Hakim Wasmat lebih bersifat administratif dan pasif, yaitu menunggu laporan dari Jaksa yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara pengawasan dari masyarakat secara implementatif belum bisa optimal berjalan, karena sampai saat ini belum ada mekanisme tehnik prosedur yang pasti dan secara kontinyu bisa mengakomodasi pengawasan dari masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, menurut penulis remisi merupakan hak dari warga binaan atau narapidana dan tetap diberikan dengan memperketat persyaratan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapat remisi. Ketika seorang narapidana memenuhi syarat, dia berhak diberi remisi sekalipun dia terjerat kasus tindak pidana luar biasa. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak memandang siapapun itu. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru

¹⁷ Mosgan Situmorang, "Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi", *Jurnal Penelitian De Jure*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 16, Nomor 4 Desember 2016, hal. 389

¹⁸ *Ibid.*,

yaitu PP No. 99 Tahun 2012 mengenai persyaratan khusus bagi narapidana tipikor, mereka sepatutnya diberikan kesempatan untuk bersedia membantu aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian akan lebih mudah negara kita memberantas tindak pidana luar biasa ini sehingga para narapidana tersebut mendapatkan bimbingan yang positif serta dapat merubah pola pikir narapidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Tentunya dalam pemberian remisi yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, terdapat aspek positif dan aspek negatif dalam mempertimbangkan pelaksanaan remisi. Aspek positif yang didapat yaitu pada prinsipnya remisi dapat berkontribusi terhadap kelancaran proses pembinaan warga binaan atau narapidana selama bisa berkelakuan baik berada di rumah tahanan. Selain itu remisi merupakan pengurangan masa pidana maka pengurangannya dapat mengurangi over kapasitas yang terjadi di rumah tahanan maupun LAPAS, dan remisi sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memperlakukan narapidana secara manusiawi karena narapidana ini juga memiliki keluarga, sehingga remisi dapat dikatakan sebagai harapan bagi narapidana untuk bisa kembali ke keluarga dan dapat berkarya dalam lingkungan masyarakat. Kemudian remisi merupakan bagian dari hak yang wajib dilindungi oleh negara, diharapkan potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rumah tahanan akan berkurang.

Aspek negatif dari pemberian remisi antara lain bertentangan dengan semangat nasional untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kedua, terkait kasus korupsi, sesungguhnya banyak narapidana yang terzalimi dalam arti tidak memiliki niat untuk berbuat koruptif namun hanya sekedar menjalankan wewenang yang ada padanya selaku aparatur negara tetapi oleh sistem hukum yang berlaku harus dipidana dan dicap sebagai korups walaupun jelas-jelas tidak menikmati hasil yang dimaksud.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Kantor Wilayah Jawa Timur Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki satuan kerja di Kabupaten Magetan yaitu Rumah Tahanan Klas II B Magetan yang beralamat di Jl. Merapi No. 168 Magetan. Rumah Tahanan ini dibangun pada tahun 1952 dengan luas tanah 4680 m² dan luas bangunan 1549 m²,

berisi kamar hunian tahanan dan narapidana dengan luas 487 m². Tugas dan fungsi dari Rumah Tahanan antara lain adalah untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Para narapidana berharap semoga pembinaan yang dilakukan di Rutan dapat lebih baik lagi dan ketika narapidana keluar dari rutan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa diterima di masyarakat.

Kedua, pelaksanaan remisi yang dilakukan di Rumah Tahanan Klas II B Magetan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Peraturan Menteri No. 21 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menghubungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Selain hak mendapatkan remisi, menurut Rumah Tahanan Klas II B Magetan, salah satu hak bagi narapidana yaitu hasil karya yang dibuat oleh narapidana dapat dipamerkan dalam etalase dalam rangka perayaan hari jadi kabupaten Magetan setiap tahunnya.

Ketiga, kendala dalam pelaksanaan remisi pada Rumah Tahanan Klas II B Magetan antara lain sisi substantifnya, yaitu dalam hal berperilakunya narapidana di Rumah Tahanan, selama narapidana dapat dengan mudah mengikuti pembinaan dan bisa berkelakuan baik, maka pengajuan usulan remisi juga lebih mudah didapatkan. Selain itu, kendala lain adalah pelayanan narapidana oleh petugas rumah tahanan, minimnya keahlian petugas dalam sistem IT pengajuan remisi secara online, dan adanya persyaratan khusus pada pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi yang terkait dengan PP No.99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan.

Keempat, solusi yang dapat diberikan untuk menanggulangi kendala yang muncul pada pelaksanaan remisi yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan horizontal dan vertikal. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Ditjen Perasyarakatan dan eksternal yang dilakukan dilakukan oleh pihak yang memiliki garis koordinasi secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM.

4.2 Saran

Pertama, bagi petugas Rumah Tahanan Klas II B Magetan untuk tetap meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap warga binaan

dalam segala bidang sehingga pencapaian tujuan dalam pelaksanaan remisi dapat tercapai, antara lain diharapkan agar warga binaan setelah keluar dari rumah tahanan dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Kedua, bagi para warga binaan yang ada di Rumah Tahanan Klas II B Magetan seyogyanya mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang ada di Rumah Tahanan sehingga dengan begitu warga binaan lebih mudah untuk mendapatkan hak-haknya kembali yaitu remisi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persantunan

Pertama, kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat penyertaan dan kasihNya yang melimpah saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *Kedua*, kepada kedua orang tua tercinta Bapak Bambang dan Ibu Dyah yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya, *Ketiga*, kepada Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. *Keempat*, kepada para sahabat tercinta yang selalu memberi semangat dan membantu serta menemani saya dalam melakukan penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Husin, Kadri. (2016). *Sistem Peradilan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2011). *Hukum Panitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Rusli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Aksara
- Surbakti, Natangsa dan Sudaryono. (2005). *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan Moeljatno.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PR.08.03 tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Perasyarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator

Jurnal Hukum

Al Amruzi, M. Fahmi, 2014 “*Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana*”, Jurnal Darussalam, Vol. 15, Nomor 2

Situmorang, Mosgan, Desember 2016 “*Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*”, Jurnal Penelitian De Jure, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 16, Nomor 4